

## **PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENGANGGARAN DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis)**

Dede Abdul Rozak  
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis  
rozakdede@gmail.com

Roni Marsiana Suhendi  
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis  
ronimarsiana@unigal.ac.id

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial (Suatu studi Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: 1). Bagaimana Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis?. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan melalui penyebaran kuisioner, teknik analisis dengan melakukan analisis koefisien korelasi Product Moment, Koefisien Korelasi Ganda, Uji Koefisien Determinasi Ganda, Uji hipotesis menggunakan Uji Signifikansi (Uji T) dan Uji Koefisien Regresi secara bersama – sama (uji F). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis dengan besarnya pengaruh 19,36% dan sisanya 80,64% telah dipengaruhi oleh faktor lain.*

*Kata Kunci: Partisipasi dalam Penganggaran, Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Kinerja Manajerial.*

### **I. Pendahuluan**

*Good Governance* merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan. Pola - pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu masalah penting.

Selain pemerintahan yang baik partisipasi penganggaran saling berkaitan satu sama lain. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan

optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Selain adanya partisipasi dari beberapa pihak, dalam penyusunan anggaran diperlukan pengawasan dari pengelola keuangan daerah. Peran manajerial pengelola keuangan daerah adalah aktivitas manajemen yang berkesinambungan dengan strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuangan (Halin dan Damayanti dalam Nur-Asikin, 2007:16).

Peran manajerial pengelola keuangan daerah bisa di sebut juga pengguna anggaran. Penggunaan anggaran itu sendiri adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala satuan kerja perangkat daerah yang di tetapkan sebagai pengguna anggaran. Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang di alokasikan pada satuan kerja yang di pimpin nya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang di kelola oleh bendahara. Dalam konteks penyusunan pelaksanaan dan penatausahaan, pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran), melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di pimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang di pimpinnya, dan mengawasi pelaksanaan SKPD yang di pimpinnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari penyusunan anggaran, anggaran yang sudah jadi sampai kepada realisasi dari anggaran tersebut akan mempengaruhi kinerja manajerial itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan dari penyusunan anggaran, anggaran yang sudah jadi sampai kepada realisasi dari anggaran tersebut akan mempengaruhi kinerja manajerial itu sendiri. Kinerja manajerial merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dan atasannya langsung.

Demikian pula halnya dengan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Ciamis dalam menyusun anggarannya di perlukan patisipasi dari para pengguna anggaran, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyusun RKA-

SKPD, sehingga anggaran yang diajukan untuk kegiatannya dapat dikaji oleh pemerintah kabupaten ciamis. Selain adanya partisipasi dari pengguna anggarann tersebut, dalam menyusun anggaran, peran manajerial pengelola keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan anggaran yang sudah jadi, sehingga anggaran yang sudah tersedia benar-benar dapat diserap dan direalisasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dapat meningkatkan atau bahkan menghambat kinerja manajerial apabila anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik. Berikut data anggaran pada DPPKAD Kabupaten Ciamis dari tahun 2010 sampai 2014:

**Tabel 1. Anggaran & Realisasi DPPKAD Kab Ciamis Tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	22.295.851.322	21.700.844.257	97,33
2011	13.462.076.550	13.029.899.534	96,79
2012	23.796.954.000	22.386.079.299	94,07
2013	31.866.772.500	29.880.117.726	93,77
2014	36.516.982.645	34.985.550.225	95,81

Sumber: DPPKAD Kab. Ciamis (data diolah)

Berdasarkan data di atas, anggaran tersebut di susun oleh bagian anggaran di DPPKAD Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2010 anggaran yang tersedia Rp22.295.851.322,00. Sedangkan realisasinya Rp21.700.844.257,00 dengan persentasi 97,33%. Pada tahun 2011 anggaran yang tersedia Rp13.462.076.550,00 sedangkan realisasinya Rp13.029.899.534,00 dengan persentase 96,79%. Pada tahun 2012 anggaran yang tersedia Rp23.796.954.000,00 sedangkan realisasinya Rp22.386.079.299,00 dengan persentase 94,07%. Pada tahun 2013 anggaran yang tersedia Rp31.866.772.500,00 sedangkan realisasinya Rp29.880.117.726,00 dengan persentase 93,77%. Pada tahun 2014 anggaran yang tersedia Rp36.516.982.645,00 sedangkan realisasinya Rp34.985.550.225,00 dengan persentase 95,81. Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa realisasinya belum optimal dari anggaran dikarenakan kinerja manajerial belum maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan program yang baik. Seperti tampak pada tabel di atas secara keseluruhan atau selama 5 tahun anggaran seluruhnya belum terserap secara optimal, karena pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan pada hasil musyawarah.

Upaya DPPKAD agar kinerja manajerial berjalan dengan baik di antaranya pemerintah harus melakukan pelatihan keuangan secara berkala, supaya menghasilkan kinerja yang berkualitas. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh DPPKAD yaitu berpartisipasi dalam penyusunan anggaran oleh pihak bawahan sehingga pihak bawahan akan termotivasi

dalam menjalankan program kerja yang akan berjalan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada DPPKAD. Selanjutnya DPPKAD mengikutsertakan pihak atasan dan bawahan untuk melakukan musyawarah agar menghasilkan mutu dan kualitas yang baik sehingga karyawan bisa dengan mudah bekerja tanpa ada rasa terbebani dan hubungan antara atasan dan bawahan semakin kuat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis; 2) Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis; 3) Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial di DPPKAD Kabupaten Ciamis.

## II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah untuk menganalisis dua variabel bebas, yaitu Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan terhadap satu variabel terikat, yaitu kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis.

Agar penelitian ini menjadi terarah, maka terlebih dahulu harus dipahami konsep dari antar variabel yang akan dijelaskan berikut ini. Partisipasi Anggaran adalah proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran (Pratiwi, 2014:19). Menurut Milani dalam Pratiwi (2014:22) mengutarakan bahwa ada enam item yang di gunakan untuk mengukur partisipasi dalam penyusunan anggaran, yaitu:

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran;
2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran;
3. Kebutuhan memberikan pendapat;
4. Kerelaan dalam memberikan pendapat;
5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir;
6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan saat anggaran sedang di susun.

Sementara itu peran manajer pengelola keuangan adalah aktifitas manajemen yang berkesinambungan dengan strategi perencanaan dan pengendalian dalam keuangan (Halim dan Damayanti dalam Nur-Asikin, 2007:16). Menurut Henry Mintzberg dalam Herminingsih

(2009:32) menjelaskan bahwa ada sepuluh peran yang di mainkan oleh manager di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Peran *Interpersonal* atau Peran Antar Pribadi;
2. Peran Pemberi Informasi;
3. Peran Pengambilan Keputusan.

Sedangkan kinerja manjerial merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan di komunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada bawahan, antara karyawan dengan atasannya langsung (Anwar dalam Wilmanzah, 2014:5). Menurut Mahoney et.al dalam Putra, 2013:2) mengungkapkan bahwa kinerja manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Investigasi;
3. Koordinasi;
4. Evaluasi;
5. Pengawasan;
6. Penataan staff (*staffing*);
7. Negosiasi;
8. Perwakilan;
9. Kinerja secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada para aparatur atau pegawai DPPKAD Kabupaten Ciamis. Sementara itu teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik dengan beberapa alat analisis seperti analisis koefisien korelasi berganda, analisis regresi liner berganda, uji t dan uji F.

### III. Hasil

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kab Ciamis. Keterkaitan partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah dengan kinerja manajerial diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien korelasi ganda ( $r$ ) sebesar 0,44 yang artinya bahwa partisipasi anggaran

dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja manajerial berpengaruh dengan interval penilaian sedang, untuk hasil analisis determinasi (KD) yaitu untuk mengetahui sejauh mana besarnya persentase pengaruh partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial dengan hasil sebesar 19,36%, artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja manajerial berpengaruh dan sisanya 80,64 % telah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis ternyata  $F_{hitung}$  nya adalah sebesar 12,5 sedangkan  $F_{tabel}$  nya adalah sebesar 3,18. Artinya  $12,5 > 3,18$ . maka  $H_0$  ditolak, dengan kata lain  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial, yang artinya partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siegel dan Marconi dalam Herminingsih (2009:76) yang mengemukakan bahwa partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah. Sementara itu menurut Schiff dan Lewin dalam Sardjito (2007) mengemukakan bahwa anggaran memiliki dua peranan, Pertama, anggaran berfungsi sebagai perencanaan, yang didalamnya berisi tentang ringkasan rencana - rencana keuangan organisasi dimasa yang akan datang. Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yaitu Ada pengaruh antara partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Secara teori ketiga hubungan variabel tersebut yaitu partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis memiliki partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja

manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis. Artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis, dimana apabila partisipasi anggaran dan peran manajerial baik maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kab Ciamis. Keterkaitan partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah dengan kinerja manajerial diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien korelasi ganda ( $r$ ) sebesar 0,44 yang artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja manajerial berpengaruh dengan interval penilaian sedang, untuk hasil analisis determinasi ( $KD$ ) yaitu untuk mengetahui sejauh mana besarnya persentase pengaruh partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial dengan hasil sebesar 19,36%, artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja manajerial berpengaruh dan sisanya 80,64 % telah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis ternyata  $F_{hitung}$  nya adalah sebesar 12,5 sedangkan  $F_{tabel}$  nya adalah sebesar 3,18. Artinya  $12,5 > 3,18$ . maka  $H_0$  ditolak, dengan kata lain  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial, yang artinya partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis dapat meningkatkan kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siegel dan Marconi dalam Herminingsih (2009:76) yang mengemukakan bahwa partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat

mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah. Kemudian menurut Schiff dan Lewin dalam Sardjito (2007) mengemukakan bahwa anggaran memiliki dua peranan, Pertama, anggaran berfungsi sebagai perencanaan, yang didalamnya berisi tentang ringkasan rencana - rencana keuangan organisasi dimasa yang akan datang. Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.

Faktor lainnya dalam keberhasilan kinerja manajerial dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah adalah dari karakteristik Pemerintah Daerah nya itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2015) diperoleh hasil bahwa karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yaitu ada pengaruh antara partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Secara teori ketiga hubungan variabel tersebut yaitu partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis memiliki partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis. Artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis, dimana apabila partisipasi anggaran dan peran manajerial baik maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial.

#### **IV. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan peran manajerial terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis pada tahun 2015. Artinya bahwa

partisipasi dalam penganggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis. Apabila partisipasi dalam penganggaran baik maka kinerja manajerial akan meningkat pula.

2. Peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis pada tahun 2015. Artinya bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis. Apabila peran manajerial pengelola keuangan daerah baik maka kinerja manajerial akan meningkat pula.
3. Partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab Ciamis pada tahun 2015. Artinya bahwa partisipasi anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, dimana apabila partisipasi anggaran dan peran manajerial baik maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial.

### Daftar Pustaka

- Akbar, DS. 2015. Peran Karakteristi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. Vol 3, No 2. Maret 2015.
- Anthony, R. Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*, jilid II Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Brownell, Peter. 1982. *The Role of Accounting Data In Performance Evaluasi. Budgetary Participation, and Organizational effectiveness*. *Journal of Accounting Research*. Vol 20. PP 12-27.
- Djalil, Muslim A dan Fazli Syam. 2006. *Pengaruh Orientasi Profesional terhadap Konflik peran: Interaksi antara Paetisipaso Anggaran dan pengguna Anggaran sebagai Alat Ukur Kinerja dengan Orientasi Manajerial (Suatu Penelitian Empiris pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di propinsi Nangro Aceh Darusalam)*. Simposium Nasional akuntansi IX Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Gordon. et. al. 2000. *Anggaran*. Edisi Pertama. Jilid 2 Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, TH. 2002. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanif dan Darsono Prawironegoro. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep dan plikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Hasibuan, Malayu S.p. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lili Sadeli dan Bejo Siswanto. 2004. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2008. *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*. Cetakan ke-8, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2010. *Akuntansi manajemen*. Edisi ke-3. Jakarta: Salema Empat.
- Siagian, P.Sondang. 2007. *Fungsi – Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siegel and Marcony. 1989. *Behavioral Accounting*. South Western Publising Co. Cincinanti, OH.
- Siswanto, Bejo. 2003. *Manajeen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Supriono, R,A. 2004. *Pegaruh Variabel intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisai terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia: Vol.19, No. 3.
- Wilmanzah, W. 2014. *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang.